



## Analisis Kinerja Serta Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh pada Periode Tahun Anggaran 2017-2023

Cherlita Anjani<sup>1</sup>, Iskandar Sam<sup>2</sup>, Rahayu<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>, Universitas Jambi

Korespondensi penulis: [anjnicherlita@email.com](mailto:anjnicherlita@email.com)

**Abstract.** *This study analyzes the financial performance and condition of the Sungai Penuh City Government from 2017 to 2023. Financial performance is measured using key ratios such as independence, effectiveness, efficiency, activity, growth, and solvency. Financial condition is assessed through the Brown Model (10-Point Test). Using a descriptive quantitative approach, the research is based on secondary data from APBD realization reports. The results show fluctuating performance, with high fiscal dependence on central government transfers and inconsistent growth in PAD and spending efficiency. The city's financial condition is categorized as moderate, with solvency as a critical concern. Supported by legitimacy and signaling theories, the study emphasizes the importance of transparency and financial strategy to build public trust and improve regional fiscal health.*

**Keywords:** Financial Performance, Fiscal Condition, Financial Ratios.

**Abstrak.** Penelitian ini menganalisis kinerja dan kondisi keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh tahun 2017–2023. Kinerja diukur melalui rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, aktivitas, pertumbuhan, dan solvabilitas, sedangkan kondisi keuangan dinilai dengan Model Brown (10-Point Test). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif berdasarkan data sekunder dari laporan realisasi APBD. Hasil menunjukkan bahwa kinerja keuangan cenderung fluktuatif, dengan ketergantungan tinggi pada transfer pusat serta efisiensi dan pertumbuhan yang belum stabil. Kondisi keuangan berada pada kategori sedang, dengan solvabilitas sebagai perhatian utama. Dengan mengacu pada teori legitimasi dan teori sinyal, penelitian ini menekankan pentingnya transparansi dan strategi fiskal untuk memperkuat kepercayaan publik dan keberlanjutan fiskal daerah.

**Kata kunci:** Kinerja Keuangan, Kondisi Keuangan, Rasio Keuangan

### 1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara dengan tingkat keragaman yang tinggi. Untuk mengelola keberagaman ini, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada kepala daerah guna mengatur wilayah mereka sesuai dengan kebutuhan spesifik tiap daerah. Dasar hukum utama dari mekanisme ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang memastikan bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah berjalan adil, selaras, transparan, dan akuntabel. (Peraturan Pemerintah RI, 2025)

Untuk memastikan akuntabilitas publik, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pengelolaan anggaran dengan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam mendukung berbagai kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)—sebagai perwujudan kuantitatif dari target dan tujuan pemerintahan daerah serta fungsi utama setiap unit kerja—harus dirancang dengan struktur yang berorientasi pada pencapaian kinerja yang terukur. Dengan pendekatan ini, APBD dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kebutuhan pembiayaan untuk mencapai berbagai sasaran strategis,

menjalankan tugas utama pemerintahan, serta menyesuaikan dengan kondisi, potensi, aspirasi, dan kebutuhan nyata masyarakat dalam satu periode anggaran. Sebagai hasilnya, dana yang dialokasikan untuk mendukung beragam program dan kegiatan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta meningkatkan layanan publik secara optimal. (Sinambela et al., 2018). Untuk mengukur transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan APBD, Pemerintah Pusat menginstruksikan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan memiliki keleluasaan dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Selain Mengukur kinerja keuangan, dalam APBD Pemerintah Daerah juga dapat dilihat kondisi keuangan Pemerintah Daerah, Kondisi keuangan pemerintah daerah mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya untuk menjalankan pemerintahan, memenuhi kewajiban finansial, dan menyediakan layanan bagi masyarakat. Pemerintah daerah yang memiliki kondisi keuangan yang baik dapat mengelola pendapatan dan pengeluaran dengan efisien serta tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan dari pemerintah pusat.

Salah satu alat yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah analisis rasio keuangan. Penggunaan analisis rasio laporan keuangan secara luas telah banyak diterapkan pada perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik, khususnya pemerintah daerah, penggunaan analisis rasio keuangan masih sangat terbatas. Padahal, dari analisis rasio keuangan laporan keuangan pemerintah daerah, dapat diketahui bagaimana kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan dan dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Kemudian salah satu model yang dapat menggambarkan kondisi keuangan ialah Model Brown: Uji 10-Poin Kondisi Keuangan. (Ritongga Taufiq, 2014).

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana operasional keuangan yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengelola anggaran dalam satu tahun fiskal. Di satu sisi, APBD menetapkan batas maksimal pengeluaran yang dialokasikan untuk

pembiayaan berbagai program dan proyek daerah. Di sisi lain, APBD juga menggambarkan perkiraan pendapatan serta sumber penerimaan yang akan digunakan untuk menutup kebutuhan anggaran tersebut, memastikan keseimbangan antara pendapatan dan belanja dalam mendukung pembangunan daerah secara efektif.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang berasal dari potensi ekonomi suatu wilayah dan diperoleh melalui berbagai mekanisme yang telah ditetapkan. Proses ini mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023, yang mengatur tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, guna memastikan optimalisasi penerimaan daerah dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (Peraturan Pemerintah RI, 2025)

### **Belanja Daerah**

Berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024, seluruh kewajiban Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran yang berjalan dianggap sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan dicatat sebagai belanja daerah. Belanja daerah mencakup setiap pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dikembalikan, serta pengeluaran lain yang berfungsi mengurangi ekuitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **Kinerja Keuangan**

Menurut (Purwanti & Noviyanti, 2021), Kinerja Keuangan mencerminkan suatu ukuran performa yang menggunakan indikator finansial. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai performa di masa lalu melalui beragam analisis diterapkan untuk menentukan posisi keuangan yang dapat menggantikan suatu entitas, sekaligus menilai keberlanjutan potensi kinerja di masa mendatang. Evaluasi ini mencakup aspek strategis dan finansial guna memastikan stabilitas serta efektivitas pengelolaan sumber daya.

Beberapa rasio yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan diantaranya:

- a) Rasio Kemandirian
- b) Rasio Efektivitas dan Efisiensi
- c) Rasio Aktivitas
- d) Rasio Pertumbuhan
- e) Rasio Solvabilitas Anggaran

### **Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah**

Secara umum, kondisi keuangan pemerintah daerah merujuk pada kapasitas suatu pemerintah dalam memenuhi kewajiban finansialnya, baik dalam bentuk pembayaran utang maupun penyediaan layanan publik secara konsisten dan tepat waktu. Hal ini mencerminkan

stabilitas fiskal serta efektivitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki. (Yati & Asmara, 2020). Serta penyediaan layanan dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah suatu peran pemerintah yang tidak bisa digantikan di era modern.

Dalam menganalisis Kondisi Keuangan pemerintah ada beberapa model yang dapat digunakan diantaranya:

**a) Fiscal Trend Monitoring System (FTMS)**

Fiscal Trend Monitoring System (FTMS) dikembangkan oleh the International City/County Management Association (ICMA) pada tahun 1980 dan telah direvisi dua kali pada tahun 1994 dan 2003. FTMS adalah sistem peringatan dini untuk memprediksi kondisi keuangan pemda melalui analisis tren untuk beberapa Indikator, ICMA mendefinisikan kondisi keuangan pemda sebagai kemampuan pemda untuk membiayai layanan secara berkelanjutan.

**b) Model Kloha, Weissert, Kleine Skala 10-Poin Kesehatan Keuangan**

Kloha et al (2005) mendefinisikan kondisi keuangan pemda dalam konteks kesulitan fiskal. Mereka mendefinisikannya sebagai suatu kondisi dimana Pemda tidak dapat memenuhi standar dalam operasi, hutang dan kebutuhan masyarakat selama beberapa tahun berturut-turut.

**c) Model Brown: Uji 10-Poin Kondisi Keuangan**

Pada tahun 1993 dan 1996, Brown memperkenalkan 10 rasio utama sebagai alat pengukuran kondisi keuangan pemerintah daerah dengan jumlah penduduk di bawah 100.000 jiwa. Rasio-rasio ini mencakup empat aspek fundamental dalam keuangan daerah, yaitu pendapatan, belanja, posisi operasi, dan struktur utang, yang secara keseluruhan memberikan gambaran menyeluruh mengenai stabilitas dan kesehatan finansial suatu wilayah. (Iqbal, 2020).

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian yang bertujuan untuk memberikan solusi atas suatu masalah serta mengumpulkan informasi yang lebih mendalam mengenai suatu fenomena. Pendekatan ini menggunakan langkah-langkah kuantitatif untuk mendapatkan data yang dapat dianalisis secara statistik. (Paramita Daniar Wijaanti et al., 2021).

Penelitian ini menggunakan data Sekunder, Selain itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017–2023.

Metode analisis data yang digunakan ialah rasio diantaranya:

1. Rasio Kemandirian
2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi
3. Rasio Aktivitas
4. Rasio Pertumbuhan
5. Rasio Solvabilitas Anggaran
6. Selain itu, model Brown digunakan untuk menilai kondisi keuangan

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Kinerja Keuangan

##### 1. Rasio Kemandirian Keuangan

**Tabel 1. hasil perhitungan yang di peroleh**

Tahun anggaran	PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio kemandirian	Kriteria
2017	31.420.979.313,39	686.380.386.862,49	4,6	Rendah Sekali
2018	34.184.049.669,58	727.122.042.033,41	4,7	Rendah Sekali
2019	34.900.741.628,35	823.157.323.136,42	4,2	Rendah Sekali
2020	29.050.525.938,63	749.342.006.963,20	3,9	Rendah Sekali
2021	59.122.772.421,76	690.173.221.803,00	8,6	Rendah Sekali
2022	69.262.435.425,76	775.249.381.106,76	8,9	Rendah Sekali
2023	69.634.628.107,77	761.196.247.749,35	9,1	Rendah Sekali
<b>Rata-rata</b>			<b>6,3</b>	

Berdasarkan pada hasil perhitungan yang di peroleh pada tabel diatas dapat diketahui bahwa dalam periode tahun anggaran 2017 hingga 2023, kemandirian keuangan Kota Sungai Penuh dapat dikategorikan sebagai rendah sekali, dengan rata-rata rasio kemandirian sebesar 6,3. Berdasarkan hasil perhitungan dapat di simpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh memiliki kinerja keuangan yang sangat rendah karen persentase masih berada pada 0,00 samapi 10,00%.

##### 2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Keuangan Daerah

**Tabel 2. hasil perhitungan rasio efektivitas Kota Sungai Penuh**

Tahun anggaran	Realisasi Pengeluaran Belanja	Anggaran Penerimaan Pendapatan	Rasio Efektivitas	Kriteria
2017	31.420.979.313,39	42.626.159.749,00	73,7	Tidak Efektif
2018	34.184.049.669,58	44.450.686.693,30	76,9	Kurang Efektif
2019	34.900.741.628,35	47.073.181.315,73	74,1	Tidak Efektif
2020	29.050.525.938,63	27.855.371.496,36	104,2	Sangat Efektif
2021	59.122.772.421,76	56.517.322.920,04	104,6	Sangat Efektif
2022	69.262.435.425,76	99.153.433.136,00	69,8	Tidak Efektif
2023	69.634.628.107,77	103.271.603.750,00	67,43	Tidak Efektif
<b>Rata-rata</b>			<b>81,53</b>	

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas Kota Sungai Penuh untuk tahun anggaran 2017-2023 yang berada pada angka 81,6%, dapat disimpulkan bahwa pencapaian target PAD masih belum optimal. Meskipun terdapat beberapa tahun dengan efektivitas tinggi (2020 dan

2021), tahun-tahun lainnya menunjukkan bahwa realisasi PAD masih berada di bawah target anggaran yang ditetapkan. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa stabilitas dalam perencanaan dan pengelolaan PAD masih menjadi tantangan utama bagi pemerintah daerah.

**Tabel 3. hasil perhitungan yang di peroleh**

<b>Tahun anggaran</b>	<b>Realisasi Pengeluaran Belanja</b>	<b>Anggaran Penerimaan Pendapatan</b>	<b>Rasio Efisiensi</b>	<b>Kriteria</b>
2017	604.292.756.704,65	686.380.386.862,49	88,04	Cukup Efisien
2018	650.631.130.036,44	727.122.042.033,41	89,48	Cukup Efisien
2019	708.183.732.394,65	823.157.323.136,42	86,03	Cukup Efisien
2020	605.535.610.409,50	749.342.006.963,20	80,81	Cukup Efisien
2021	803.620.526.157,00	690.173.221.803,00	116,44	Tidak Efisien
2022	791.958.914.856,00	775.249.381.106,76	102,16	Tidak Efisien
2023	788.700.596.914,53	761.196.247.749,35	103,61	Tidak Efisien
<b>Rata-rata</b>			<b>95,22</b>	

Berdasarkan hasil perhitungan yang di peroleh dari tabel bahwasanya Kinerja Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh di kategorikan kurang efisien berdasarkan rata-rata perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah, yang mana Kota Sungai Penuh menunjukkan kurang stabil selama periode 2017 hingga 2023. Pada tahun 2017 hingga 2020, nilai rasio efisiensi berada pada kisaran 80,81% hingga 89,48%, yang dikategorikan sebagai “Cukup Efisien”, artinya realisasi pengeluaran belanja masih cukup terkendali terhadap pendapatan yang diterima. Namun, mulai tahun 2021 hingga 2023, rasio efisiensi melonjak di atas 100%, menunjukkan kondisi “Tidak Efisien”.

### 3. Rasio Aktivitas (Keserasian Belanja Daerah)

**Tabel 4. hasil perhitungan yang di peroleh**

<b>Tahun anggaran</b>	<b>Total Belanja Rutin</b>	<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>Rasio Belanja</b>	<b>Kriteria</b>
2017	430.961.590.676,85	604.292.756.704,65	71,3	Baik
2018	455.919.258.524,64	650.631.130.036,44	70,1	Baik
2019	531.450.668.685,68	708.183.732.394,65	75,0	Baik
2020	450.235.040.378,18	605.535.610.409,50	74,4	Baik
2021	528.987.650.987,63	803.620.526.157,00	65,8	Baik
2022	547.334.625.031,74	791.958.914.856,00	69,1	Baik
2023	556.823.749.834,70	788.700.596.914,53	70,6	Baik
<b>Rata-rata</b>			<b>66,3</b>	

Berdasarkan hasil perhitungan yang di peroleh dari tabel 4. bahwasanya Kinerja Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh di kategorikan “Baik”, dengan rata-rata sebesar 66,3%, artinya, belanja rutin (seperti gaji pegawai dan operasional kantor) masih berada pada tingkat yang wajar dan tidak sepenuhnya mendominasi belanja daerah. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Sungai Penuh masih menyediakan ruang fiskal untuk belanja pembangunan atau investasi daerah.

**Tabel 5. hasil perhitungan yang di peroleh**

<b>Tahun</b>	<b>Total Belanja Pembangunan</b>	<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>Rasio Belanja</b>	<b>Kriteria</b>
2017	173.331.166.027,80	604.292.756.704,65	28,7	Tidak Baik

2018	194.683.207.113,80	650.631.130.036,44	29,9	Tidak Baik
2019	176.535.574.208,97	708.183.732.394,65	24,9	Tidak Baik
2020	134.644.309.515,32	605.535.610.409,50	22,2	Tidak Baik
2021	168.824.198.819,37	803.620.526.157,00	21,0	Tidak Baik
2022	140.130.740.414,97	791.958.914.856,00	17,7	Tidak Baik
2023	128.618.222.875,83	788.700.596.914,53	16,3	Tidak Baik
<b>Rata-rata</b>			<b>23,0</b>	

Berdasarkan hasil perhitungan yang di peroleh dari tabel 5. bahwasanya Kinerja Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh di kategorikan Tidak Baik berdasarkan pada perhitungan rasio belanja pembangunan, yang mana Pada tahun 2017, rasio belanja pembangunan tercatat sebesar 3,9%, tahun berikutnya, 2018, rasio belanja pembangunan turun menjadi 3,5%, dan terus menurun pada tahun 2019 menjadi 2,8%. Pada tahun 2020, rasio belanja pembangunan kembali menurun tajam menjadi 1,87%, dan sedikit meningkat pada tahun 2021 menjadi 2,2%, pada tahun 2022, rasio belanja pembangunan kembali menurun menjadi 1,8%, dan pada tahun 2023, rasio ini sedikit meningkat menjadi 1,8%, tetapi masih berada dalam kategori "Tidak Baik".

#### 4. Rasio Pertumbuhan

Tabel 6. hasil perhitungan yang di peroleh

Tahun	Pendapatan $t_0$	Pendapatan $T_1$	Rasio pertumbuhan	Kriteria
2016-2017	686.197.366.175,88	707.134.635.517,20	-3,0	Rendah
2017-2018	727.122.042.033,41	686.197.366.175,88	6,0	Rendah
2018-2019	823.157.323.136,42	727.122.042.033,41	13,2	Rendah
2019-2020	749.342.006.963,20	823.157.323.136,42	-9,0	Rendah
2020-2021	690.173.221.803,00	749.342.006.963,20	-7,9	Rendah
2021-2022	775.249.381.106,76	690.173.221.803,00	12,3	Rendah
2022-2023	761.196.247.749,35	775.249.381.106,76	-1,8	Rendah
<b>Rata-rata</b>			<b>1,4</b>	

Berdasarkan hasil perhitungan yang di peroleh dari tabel , bahwasanya Kinerja Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh di kategorikan Rendah berdasarkan perhitungan Rasio pertumbuhan Pendapatan Daerah. Kota Sungai Penuh selama periode 2016–2023 hanya 1,4%, yang masuk dalam kategori rendah.

Tabel 7. rata-rata rasio pertumbuhan PAD Kota Sungai Penuh selama periode 2016–2023

Tahun	PAD $t_0$	PAD $T_1$	Rasio pertumbuhan	Kriteria
2016-2017	31.420.979.313,39	36.632.476.994,33	-14,2	Rendah
2017-2018	34.184.049.669,58	31.420.979.313,39	8,8	Rendah
2018-2019	34.900.741.628,35	34.184.049.669,58	2,1	Rendah
2019-2020	29.050.525.938,63	34.900.741.628,35	-16,8	Rendah
2020-2021	59.122.772.421,76	29.050.525.938,63	103,5	Tinggi
2021-2022	69.262.435.425,76	59.122.772.421,76	17,2	Rendah
2022-2023	69.634.628.107,77	69.262.435.425,76	0,5	Rendah
<b>Rata-rata</b>			<b>14,4</b>	

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa, rata-rata rasio pertumbuhan PAD Kota Sungai Penuh selama periode 2016–2023 berada pada angka 14,4%, yang masuk dalam kategori rendah secara keseluruhan.

Tabel 8. rata-rata rasio pertumbuhan belanja daerah Kota Sungai Penuh selama periode 2016–2023

Tahun	Belanja daerah t <sub>0</sub>	Belanja daerah T <sub>1</sub>	Rasio pertumbuhan	Kriteria
2016-2017	604.292.756.704,65	689.572.920.958,76	-12,4	Rendah
2017-2018	650.631.130.036,44	604.292.756.704,65	7,7	Rendah
2018-2019	708.183.732.394,65	650.631.130.036,44	8,8	Rendah
2019-2020	605.535.610.409,50	708.183.732.394,65	-14,5	Rendah
2020-2021	803.620.526.157,00	605.535.610.409,50	32,7	sedang
2021-2022	791.958.914.856,00	803.620.526.157,00	-1,5	Rendah
2022-2023	788.700.596.914,53	791.958.914.856,00	-0,4	Rendah
<b>Rata-rata</b>			<b>2,9</b>	

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa, rata-rata rasio pertumbuhan belanja daerah Kota Sungai Penuh selama periode 2016–2023 berada pada angka 2,9%, yang masuk dalam kategori rendah. Fluktuasi belanja daerah cukup signifikan

### 5. Rasio Solvabilitas Anggaran

Tabel 9. bahwasanya Kinerja Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh di kategorikan Cukup Baik

Tahun anggaran	Total pendapatan LRA	DAK LRA	Total belanja	Belanja modal	Rasio Solvabilitas
2017	686.380.386.862,49	90.368.820.617,00	604.292.756.704,65	173.331.166.027,80	138,30%
2018	727.122.042.033,41	92.350.598.379,00	650.631.130.036,44	194.683.207.113,80	139,22%
2019	823.157.323.136,42	104.459.666.251,00	708.183.732.394,65	176.535.574.208,97	135,18%
2020	749.342.006.963,20	96.835.566.270,00	605.535.610.409,50	134.644.309.515,32	138,57%
2021	803.620.526.121,00	92.960.161.305,00	803.620.526.157,00	168.824.198.819,37	111,95%
2022	775.249.381.106,76	91.278.733.961,00	791.958.914.856,71	140.130.740.414,97	104,93%
2023	761.196.247.749,35	101.038.997.749,00	788.700.596.914,53	129.618.222.875,83	100,16%
<b>Rata-rata</b>				<b>124,04%</b>	

Berdasarkan hasil perhitungan yang di peroleh dari tabel 9. bahwasanya Kinerja Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh di kategorikan Cukup Baik berdasarkan perhitungan Rasio Solvabilitas Anggaran, yang mana Pada tahun 2017, rasio solvabilitas anggaran tercatat sebesar 138,30%, menunjukkan bahwa total pendapatan LRA dapat menutupi total belanja dengan baik. Tahun berikutnya, 2018, rasio solvabilitas meningkat sedikit menjadi 139,22%, yang juga menunjukkan kondisi keuangan yang baik.

#### A. Kondisi Keuangan

Tabel 10. Selama periode 2017 hingga 2023, kondisi keuangan yang tercermin dalam berbagai rasio

Uraian	Tahun Anggaran						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio 1: Total pendapatan /populasi	%	105,76%	118,16%	100,73%	104,58%	102,96%	98,76%
Rasio 2: Total pendapatan dana umum dari sumber sendiri / total pendapatan dana umum	5%	6%	6%	5%	11%	13%	12%
Rasio 3: Sumber dana umum dari dana lainnya / total sumber dana umum	94,%	95%	97%	96%	94%	86%	88%
Rasio 4: Pengeluaran operasional / pengeluaran total	71%	70%	75%	74%	65%	69%	70%
Rasio 5 :Total pendapatan /pengeluaran total	115%	113%	119%	128%	96%	97%	96%
Rasio 6: Unreserved saldo dana umum / total pendapatan dana umum	19%	14%	15%	7%	-1%	2%	-0,6%

Rasio 7: Jumlah dana kas umum dan investasi / jumlah kewajiban dana umum	362%	144%	144%	372%	294%	350%	157%
Rasio 8: Jumlah kewajiban dana umum / total pendapatan dana umum	0,2%	0,4%	0,7%	0,4%	4%	2%	2%
Rasio 9: Hutang langsung jangka panjang / populasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Rasio 10: Layanan hutang / total	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Dari tabel dapat diketahui bahwa, Selama periode 2017 hingga 2023, kondisi keuangan yang tercermin dalam berbagai rasio mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada awalnya, total pendapatan dibandingkan dengan populasi menunjukkan tren yang relatif stabil, dengan lonjakan terbesar terjadi pada 2019. Namun, setelah itu, terjadi penurunan bertahap yang mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan pertumbuhan pendapatan.

Setelah perhitungan seluruh rasio dalam model brown, maka dapat diberikan skor penilaian kondisi keuangan Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh, sebagai berikut:

**Tabel 11. diketahui Kondisi keuangan Kota Sungai Penuh dari 2017 hingga 2023**

Rasio	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio1	2	2	2	2	2	2	2
Rasio 2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Rasio3	2	2	2	2	2	2	2
Rasio 4	2	2	2	2	1	1	1
Rasio5	-1	2	2	2	2	2	2
Rasio 6	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Rasio 7	2	2	2	2	2	2	2
Rasio 8	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Rasio 9	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Rasio10	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui Kondisi keuangan Kota Sungai Penuh dari 2017 hingga 2023 menunjukkan stabilitas di beberapa aspek, sementara beberapa rasio mengalami penurunan yang perlu diperhatikan. Rasio 1, 3, dan 7 tetap kuat sepanjang periode, tetapi Rasio 2 mengalami penurunan sejak 2018, mencerminkan meningkatnya ketergantungan pada dana transfer pusat. Rasio 4 juga turun sejak 2021, mengindikasikan tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Meski Rasio 5 mengalami perbaikan sejak 2018, beberapa rasio lainnya seperti Rasio 6, 8, 9, dan 10—tetap negatif, menunjukkan kelemahan dalam aspek utang dan pengelolaan kewajiban jangka panjang. Secara keseluruhan, meskipun stabil dalam beberapa hal, kondisi fiskal daerah menghadapi tantangan yang perlu diatasi dengan strategi yang lebih kuat untuk menjaga keseimbangan keuangan dan kesejahteraan masyarakat.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan:**

Berdasarkan hasil analisis mengenai Kinerja serta Kondisi Keuangan pemerintah daerah Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2017-2023 maka peneliti merumuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2017-2023, di lihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah termasuk dalam ketegori rendah dengan rata-rata 6,3%
2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2017-2023, dilihat dari Rasio Efektivitas dan Efisiensi keuangan daerah termasuk dalam ketegori kurang efektif dan kurang efisien, yang mana rasio efekektivitas dengan rata-rata 81,53% dan rasio efisiensi dengan rata-rata 95,22%
3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2017-2023, di lihat dari Rasio Aktivitas termasuk dalam ketegori baik dengan rata-rata 66,3 dari perhitungan rasio belanja rutin, dan dalam ketegori tidak baik dengan rata-rata 23,0% dari perhitungan rasio pembangunan.
4. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2017-2023, dilihat dari Rasio Pertumbuhan Keuangan termasuk dalam ketegori rendah dengan rata-rata 14,4%.
5. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2017-2023, dilihat dari Rasio Solvabilitas Anggaran secara umum masih berada dalam kategori baik, karena pendapatan daerah mampu menutupi total belanja..
6. Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh, berdasarkan penilaian dengan Model Brown (Uji 10 Poin Kondisi Keuangan). Untuk tahun anggaran 2017-2020 Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh mendapatkan skor 5 yang masuk dalam kategori “Lebih baik daripada kebanyakan Pemda” kemudian pada tahun 2021- mendapatkan skor 4 yang masuk dalam kategori “Rata-rata”.

### **Saran:**

Bagi Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh, Pemerintah Kota Sungai Penuh perlu menggali potensi sumber pendapatan asli daerah (PAD) dengan memfokuskan pada sektor-sektor lokal yang memiliki potensi besar, seperti pariwisata, pertanian, dan UMKM. Pemerintah Kota Sungai Penuh harus melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran setiap tahunnya. Agar pengelolaan anggaran lebih efisien, pemerintah daerah harus menekan belanja operasional yang tidak produktif.

## DAFTAR REFERENSI

- Iqbal, M. (2020). Desain Formulasi Penilaian Kinerja Kesehatan Fiskal Dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Provinsi Jawa Barat). *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 10(2), 13. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v10i2.46>
- Paramita Daniar Wijaanti, R., Rizal, N., & Sulistyan Bahtiar, R. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif* (Ketiga). WIDYA GAMA PRESS.
- Peraturan Pemerintah RI. (2025). *Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Purwanti, E., & Noviyanti, E. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2014-2018. *Ekonomi Dan Bisnis*, 14.
- Ritongga Taufiq, I. (2014). *Analisis Laporan Keuangan Pemda*. Pustaka Belajar.
- Sinambela, E., Sarangih, F., & Sari Nurmala, E. (2018). Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan. *Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 8 no 12.
- Yati, I. M., & Asmara, J. A. (2020). Analisis Indeks Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh Tahun 2015-2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(2), 297–306. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15594>.